

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
<i>Executive Summary</i> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM.....	2
1. <i>Organisasi Perangkat Daerah</i> .....	2
2. <i>Sumber Daya Manusia Aparatur</i> .....	5
3. <i>Sarana dan Prasarana Organisasi</i> .....	5
D. DASAR HUKUM.....	6
E. SISTEMATIKA.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	9
1. <i>VISI</i> .....	9
2. <i>MISI</i> .....	10
3. <i>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM</i> .....	10
B. PERJANJIAN KINERJA .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
1. <i>Perbandingan Target dan Realisasi</i> .....	19
2. <i>Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, 2013 dan Tahun 2012</i> .....	28
3. <i>Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah</i> .....	31
4. <i>Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan</i> .....	33
5. <i>Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i> .....	34
B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	71
LAMPIRAN.....	6Error! Bookmark not defined.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang.

LAKIP Dinas Pendapatan Daerah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, 07 Pebruari 2017  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG**

**Ir. H. ADE HERAWANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681017 199203 006

## *Executive Summary*

Fulfilling the mandate of Presidential Instruction No. 7 of 1999 On Accountability PERFORMANCE Government ( AKIP ) that require Government Agencies as Operator sure the Government gatra , to review account for the Implementation of the principal tasks and functions well as the authority and wisdom , then drafted Accountability PERFORMANCE Government Agencies ( LAKIP ) Department of Revenue the area serves as a medium of Liability , referring shown to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 CONCERNING THE PERFORMANCE Determination Guidelines for the Preparation and Accountability PERFORMANCE . Besides IT , LAKIP Also the Department of Revenue Requirement For Malang hearts analysis and evaluation costs hearts Frame

LAKIP Regional Revenue Office Malang Year 2016 presents various successes and failures in the field of local tax revenue . The success in local tax revenue is certainly not only the success of the Regional Revenue Office Malang alone , but also illustrates the success and the support and participation of the taxpayer and collector PAD SKPD of Malang in general . In addition , this report formed also present data and information relevant to the needs of decision makers in order to interpret the successes and failures of the broader and deeper.

2016 is the second year of implementation of the Strategic Plan Revenue Service Malang in 2013-2018 . Vision , Mission , Objectives , and Targets have been developed based on RPJMD Malang as can be seen in the chart below:

Vision , Mission , Goals, Objectives referring to the RPJMD Malang

<b>VISION : Local Tax Revenue Increases for Public Welfare</b>			
<b>MISSION : Increase Tax Revenue Region through Intensification and Extensification of Local Taxes</b>			
<b>GOAL</b>	<b>TARGET</b>	<b>STRATEGY</b>	<b>POLICY</b>
1. Increasing Local Tax Revenue	1. Increasing Local Tax Revenue 2. Increased Local Tax Collection Service Quality; 3. Efficient management of Regional Tax revenue	1. Intensification of Local Tax Revenue	- Improving the quality of tax authorities ; - Completion of Regional Tax Administration ; - Improved regulation of Local Tax .
		2. Extensification Local Tax Revenue	- Expansion of Tax Object ; - Expansion of the taxpayer ; - Completion of the fare.

Based on the calculation of the gains described in Performance Measurement , be explained more about the achievement of performance in 2016 with a medium-term target in the Strategic Plan document as follows :

Achievement of performance in 2016

NO	TARGET	INDICATOR TARGET	TARGET 5 OF	REALIZATION 2016
1.	Increasing Local Tax Revenue	1. Achievement of Local Tax Revenue 2. % Increase Local Tax 3. % Decrease arrears Local Taxes	100% 10% 5%	124.47 % 18.25 % 1.85 %
2.	Increased Local Tax Collection Service Quality	The value of community satisfaction survey	81.3	80.94
3.	Efficient management of Regional Tax revenue	Cost to income ratio Local Tax	<10%	10.07 %

In general , the measurement of performance achievement in 2016 showed that the level of achievement in 2016 has exceeded the target even though there are some things that decrease is the aspect of tax receivables growing area.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2016 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Malang adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama kurun waktu tahun anggaran 2016 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 sebagai bahan pengambilan kebijakan, penyusunan pengambilan rencana

program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

## C. GAMBARAN UMUM

### 1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan
  - b. Seksi Pendaftaran
  - c. Seksi Penetapan
4. Bidang PBB, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
  - b. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
  - c. Seksi Pengolahan Data
5. Bidang Penagihan, terdiri dari :
  - a. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
  - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah lainnya
  - c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya



6. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
  - b. Seksi Pengembangan Potensi
  - c. Seksi Pengelolaan Benda Berharga
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksana kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan

kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- i. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- j. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- k. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- l. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m. Pelaksanaan pemungutan Penerimaan bukan Pajak;
- n. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya;
- o. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;



- x. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;
- z. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;  
dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dilihat pada lampiran 1.

## **2. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II/b, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan Eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dengan Eselon IVa.

## **3. Sarana dan Prasarana Organisasi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didukung dengan sarana dan prasarana antara lain seperti :

- a. Komputer 138 Unit
- b. Printer 106 Unit
- c. Kursi 179 Unit
- d. Almari 35 Unit
- e. Distometer 6 Unit
- f. Mesin Ketik 6 Unit
- g. Sepeda Motor Dinas 53 Unit
- h. Mobil Dinas 18 Unit

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana tentang Inventaris barang Dinas Pendapatan Daerah Mulai dengan Tahun 2012 sampai dengan Desember 2016. Dapat terlihat pada lampiran IV.

#### D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
17. Perwal Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### ***EXECUTIVE SUMMARY***

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  1. Organisasi Perangkat Daerah
  2. Sumber Daya Manusia Aparatur
  3. Sarana dan Prasarana Organisasi
  4. Capaian Kinerja Tahun 2015
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Perbandingan Target dan Realisasi
2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013
3. Perbandingan realisasi kinerja 2016 dengan target jangka menengah (Tahun 2018)
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian program/kegiatan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indicator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut :

#### 1. VISI

Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 harus dicapai pada tahun 2016. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Malang, maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah merumuskan visi sebagai berikut:

**MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MALANG**

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

### **MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH**

## 3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu



tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

**a. Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah, tujuan yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.**

**b. Sasaran**

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah, terdapat 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
- Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah

**c. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal

yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah;
- 2) Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah;

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1. Kebijakan**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Peningkatan mutu fiskus;
- 2) Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah;
- 3) Penyempurnaan regulasi Pajak Daerah;
- 4) Perluasan Objek Pajak;
- 5) Perluasan Wajib Pajak;
- 6) Penyempurnaan tarif.

## **2. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah tahun 2016 sebagai implementasi misi yang diemban adalah sebagai berikut:

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d) Penyediaan alat tulis kantor
- e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i) Penyediaan makanan dan minuman
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k) Pawai Pembangunan
- l) Pengembangan SDM ( Workshop, Pelatihan DII

### **2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan :

- a) Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- e) Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah
- f) Pengadaan Sarana/Prasarana Penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

### **3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- b) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

- c) Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas

**4) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

Kegiatan :

- a) Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)
- b) Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)
- c) Pengolahan data dan penagihan piutang PBB
- d) Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah
- e) Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah
- f) Gebyar Sadar Pajak
- g) Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah
- h) Kajian Penetapan Target Pajak Daerah
- i) Optimalisasi Penerimaan PBB
- j) Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online
- k) Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOB) PBB
- l) Pendataan dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)
- m) Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak daerah
- n) Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah
- o) Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah
- p) Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB
- q) Kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- r) Sosialisasi pajak melalui reklame outdoor semua Bando/Baloho/Billboard se Kota Malang
- s) Perencanaan rekrutmen tenaga non PNS tahun 2017
- t) Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang

- u) Pengelolaan Benda-Benda Berharga
- v) Pembukuan dan Pelaporan
- w) Kajian Administrasi Pajak Daerah

**5) Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu**


Kegiatan :

- a) Survalance Audit ISO 9001-2005

Adapun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016 lebih lanjut disajikan dalam lampiran II. Pada aktualisasinya, 3 sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016 tercapai secara keseluruhan, dan kesemuanya telah terangkum di dalam Rencana Strategis. Demikian pula untuk pencapaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 46 kegiatan, untuk lebih jelasnya diuraikan pada bab 3 pembahasan, serta form pengukuran kinerja kegiatan pada lampiran II.

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2016 dan kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan indikator kinerja utama (indikator kinerja sasaran) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD.



Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibuat sampai level staf sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada lampiran II.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Pemerintah Kota Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukurannya yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Malang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Adapun Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Kota Malang adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kota Malang**

No	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pajak Daerah}}{\text{target Pajak Daerah}} \times 100 \%$
		- % Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}}{\text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$
		- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	$\frac{\text{Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x)}}{\text{tunggakan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	$\frac{\text{Total jumlah belanja}}{\text{Jumlah penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2016 sebagai berikut :

**Misi : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah**

**Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

**Indikator I : Capaian Penerimaan Pajak Daerah**

Capaian Penerimaan Pajak Daerah bermanfaat untuk menentukan strategi kebijakan dalam memungut Pajak Daerah.

Angka penerimaan Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 124.47 %. Penerimaan Pajak Daerah dengan capaian 116.48% termasuk kategori **sangat berhasil** yang berasal dari perhitungan rencana Rp. 301.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 374.641.673.419,65 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun macam Pajak Daerah sebanyak 9 pajak yang meliputi:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Penerangan Jalan;
- 5) Pajak Parkir;
- 6) Pajak Air Bawah Tanah;
- 7) Pajak Reklame;
- 8) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB).

Berikut ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah yang disajikan tiap Pajak Daerah yaitu :

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	27.680.570.200	37.857.637.844	136,77
2	Pajak Restoran	34.976.534.500	47.498.229.279	135,80
3	Pajak Hiburan	5.543.000.000	6.610.023.252	119,25
4	Pajak Penerangan Jalan	44.602.106.500	47.568.068.966	106,65
5	Pajak Parkir	3.501.998.000	4.887.815.130	139,57
6	Pajak Air Bawah Tanah	600.000.000	809.743.186	134,96
7	Pajak Reklame	18.676.522.800	22.101.587.217	118,34
8	Pajak BPHTB	108.550.000.000	144.892.155.137	133,48
9	Pajak PBB	56.869.268.000	62.416.413.408	109,75
<b>JUMLAH</b>		<b>301.000.000.000</b>	<b>374.641.673.420</b>	<b>124,47</b>



#### Indikator II : % Peningkatan Pajak Daerah

% peningkatan Pajak Daerah dihitung dengan formula indikator Penerimaan pajak daerah tahun 2016 dikurangi penerimaan pajak daerah tahun 2015 dibagi penerimaan pajak daerah tahun 2015 adalah sebesar 18.25 % dan termasuk kategori **sangat berhasil**.

### **Indikator III : % Penurunan tunggakan Pajak Daerah**

% penurunan tunggakan Pajak Daerah dihitung dengan formula indikator Tunggakan pajak daerah tahun 2015 dikurangi tunggakan pajak daerah tahun 2016 dibagi tunggakan pajak daerah tahun 2015 adalah sebesar 1.85 % dan termasuk kategori **kurang berhasil**.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah**

#### **Indikator : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Harapan Masyarakat (SHM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuan Terukurnya kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2016 dan terpetaknya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan. Pengolahan data yang dilakukan dalam SKM pada tahun 2016 ini akan disajikan beberapa output diantaranya meliputi :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan masyarakat. Nilai kepuasan masyarakat dihasilkan dari pengukuran survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat ini didasarkan pada Permenpan RB No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey dilaksanakan kepada 100 orang responden terlayani pajak daerah;
- Hasil Survey Harapan Masyarakat (SHM)  
Yaitu nilai penunjukan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan pelayanan yang mereka terima. Dari

data kepuasan dan harapan responden akan diketahui seberapa besar gap yang ada dari masing masing unsur pelayanan.

Adapun Hasil Survey Harapan Masyarakat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah :

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI SKM	KATEGORI	NILAI SHM	KATEGORI
1	Pelayanan PBB	76.90	Baik	97.99	Sangat Penting
2	Pelayanan Pajak Reklame	82.60	Sangat Baik	76.99	Penting
3	Pelayanan Pajak Hotel	84.77	Sangat Baik	74.94	Penting
4	Pelayanan Pajak Restoran	81.08	Baik	78.19	Penting
5	Pelayanan Pajak Parkir	79.35	Baik	77.67	Penting

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 );
- c) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



## 2) Tahapan



## 3) Teknik Survey

- a) Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
- b) Koesioner melalui pengisian sendiri;
- c) Koesioner elektronik ( internet e-survey );
- d) Diskusi kelompok terfokus
- e) Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

## 4) Penentuan Besaran dan Teknik Sample

Penentuan besaran menggunakan metode Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006), memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sample :

- a) Ukuran sample lebih dari 30 dan kuran dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian;
- b) Jika sample dipecah kedalam subsample (pria/wanita,junior, dan sebagainya), ukuran sample minimum 30 untuk tiap katagori dalam tepat;
- c) Dalam penelitian Mutivarite (termasuk analisis regresi berganda) Ukuran sample sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian;
- d) Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sample kecil antara 10 sampai dengan 20.

Teknik yang digunakan adalah random sampling, sampel diambil secara acak dengan memperhatikan jenis pajak.

5) Ruang Lingkup

Kegiatan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) dan Survey Harapan Masyarakat (SHM) tahun 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dilakukan terhadap Pelayanan PBB, Pelayanan Pajak Reklame, Pelayanan Pajak Restoran, Pelayanan Pajak Parkir, dan Pelayanan Pajak Hotel, selengkapnya bisa dilihat pada lampiran III.

Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah **BAIK** dan masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Survey Persepsi Korupsi (SPK)

1) Pengertian

Korupsi adalah segala bentuk penyalagunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survey Persepsi Korupsi 2015 mengacu pada dimensi dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam Corruption Perception Indeks (CPI).

Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang (International Transparency, 2016).

## 2) Tujuan

Tujuan survey persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan

## 3) Dasar hukum

Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

## 4) Tahapan



## 5) Teknik Survey

- a) Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
- b) Koesioner melalui pengisian sendiri;
- c) Koesioner elektronik ( internet e-survey );
- d) Diskusi kelompok terfokus;
- e) Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

## 6) Penentuan Besaran dan Teknik Sample

Penentuan besaran menggunakan metode Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006), memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sample :

- a) Ukuran sample lebih dari 30 dan kuran dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian;
- b) Jika sample dipecah kedalam subsample (pria/wanita,junior, dan sebagainya), ukuran sample minimum 30 untuk tiap katagori dalam tepat;
- c) Dalam penelitian Mutivarite (termasuk analisis regresi berganda) Ukuran sample sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian;
- d) Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sample kecil antara 10 sampai dengan 20.

Teknik yang digunakan adalah random sampling, sampel diambil secara acak dengan memperhatikan jenis pajak (Profil Layanan) dan dengan unsur persepsi korupsi :

- a) Persepsi respponden terhadap tarif yang ditetapkan di Dispenda Kota Malang;
- b) Persepsi responden terhadap kesesuaian tarif yang diminta dengan tarif yang ditetapkan;
- c) Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya permintaan biaya tambahan untuk layanan di luar biaya yang ditentukan oleh petugas;
- d) Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya tanda terima kasih kepada petugas (meskipun tidak diminta);

- e) Persepsi responden terhadap informasi kejadian korupsi di Dispenda Kota Malang.
- 7) Jumlah nilai total persepsi korupsi  
 Jumlah nilai total persepsi korupsi di jumlahkan dan dianalisis sebagai indeks persepsi korupsi dengan cara berikut :

$$\text{Nilai Persepsi Tiap Unsur} = \frac{\text{jumlah total persepsi tiap unsur}}{\text{jumlah responden}} \quad 1$$

$$\text{Nilai Persepsi Korupsi Unsur} = \frac{\text{nilai responden tiap unsur}}{3} \quad 2$$

$$\text{Nilai Persepsi Korupsi} = \frac{\text{jumlah total nilai persepsi korupsi tiap unsur}}{3} \quad 3$$

Skala indeks tiap unsur berkisar 0-1

sSkala indeks persepsi korupsi antara 0-5 yang artinya mendekati 5 maka persepsi korupsi makin baik

Nilai indeks persepsi korupsi dihitung berdasarkan rumus yang dijelaskan dalam metodologi nilai total indeks persepsi korupsi per pelayanan pajak adalah untuk pelayanan pajak PBB 4,57 dengan skala 0-5 untuk pelayanan pajak reklame 4.366 dengan skala 0-5 pelayanan pajak parkir 4.38 dengan skala 0-5 pelayanan pajak parkir 4.40 dengan skala 0-5 pelayanan pajak parkir 4.18 dengan skala 0-5 dengan nilai rata rata indeks persepsi korupsi seluruh pelayanan 4.378 dengan skala 0-5.

Dengan demikian IPK Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dinilai baik. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dilakukannya survey persepsi korupsi sehingga tidak ada nilai perbandingan pada tahun sebelumnya.

### Sasaran 3 : Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

#### Indikator : Rasio Biaya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

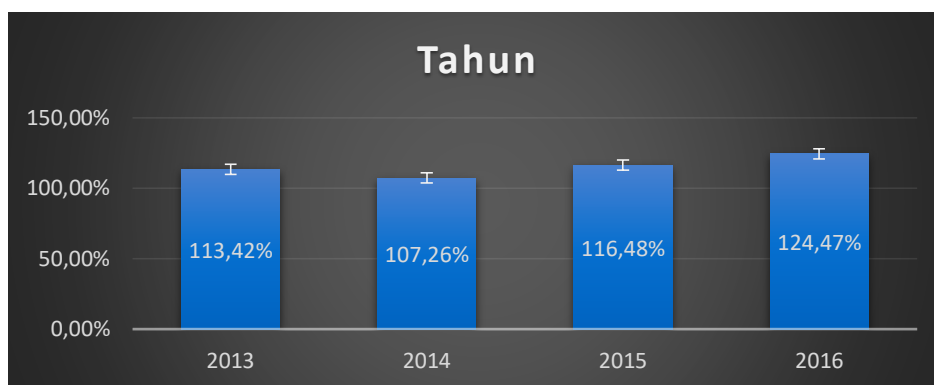
Rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah dihitung dengan formula Total jumlah belanja dibagi Jumlah penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar 10.61 %.

## 2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, dan 2013

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015, 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
113.42%	107.26%	116.48%	124.47 %

Ikhtisar pertumbuhan capaian penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



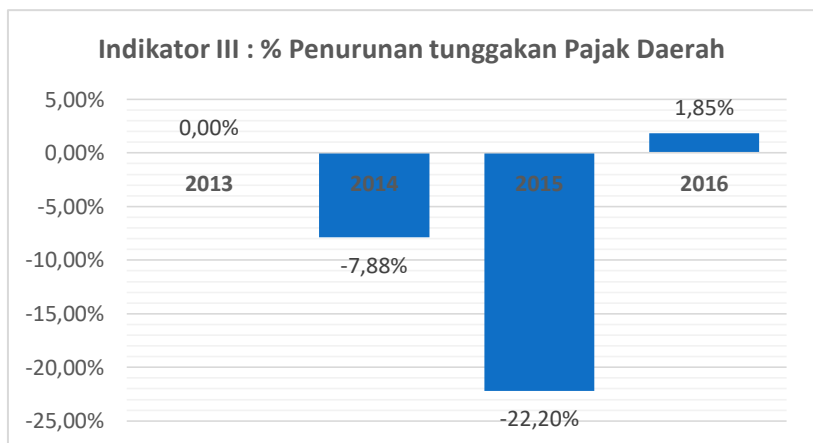
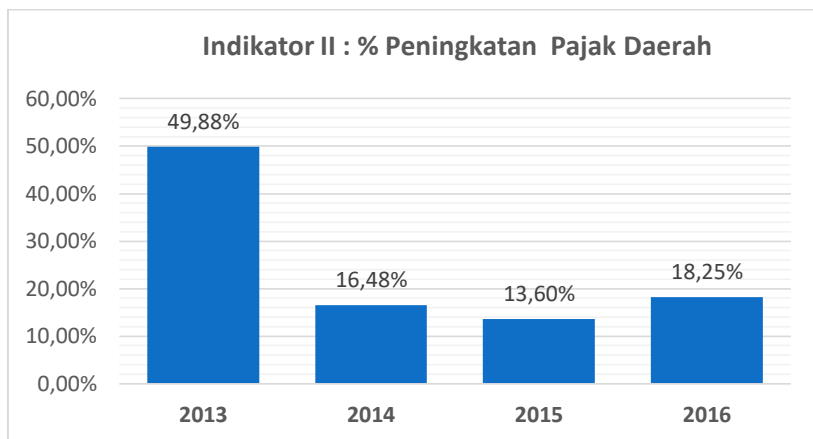
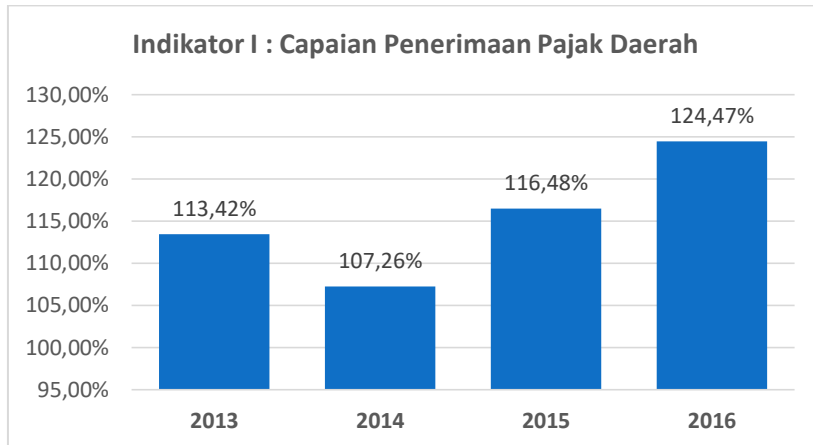
Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, 2014, dan 2013 dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran	Indikator	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	113.42%	107.26%	116.48%	124.47%
	- % Peningkatan Pajak Daerah	49.88%	16.48%	13.60%	18.25%
	- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	-	-7.88%	-22.20%	1.85%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77.62	83.22	76,20	80.94

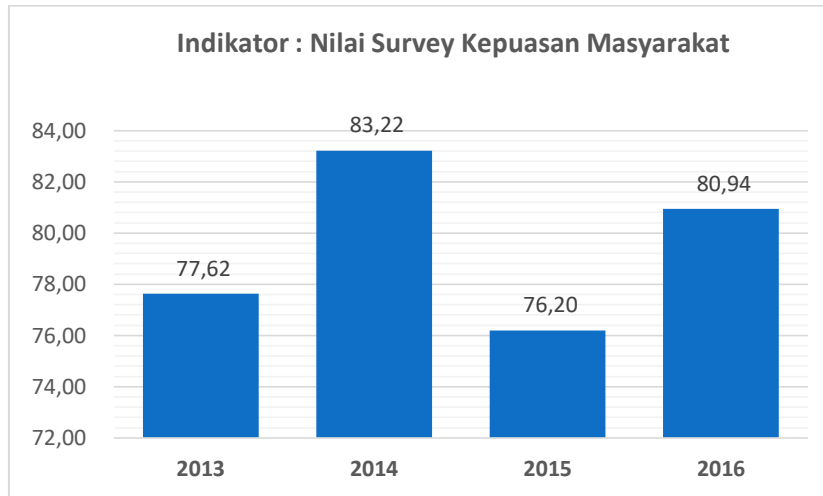


3. Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	7.70%	7.54%	11.61%	10.07%
--	------	-------	-------	--------	--------

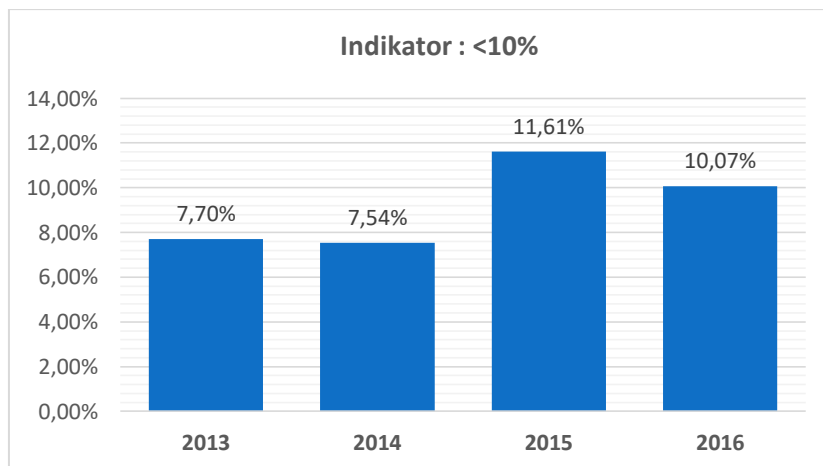
### Sasaran I : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah



## Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah



## Sasaran III : Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

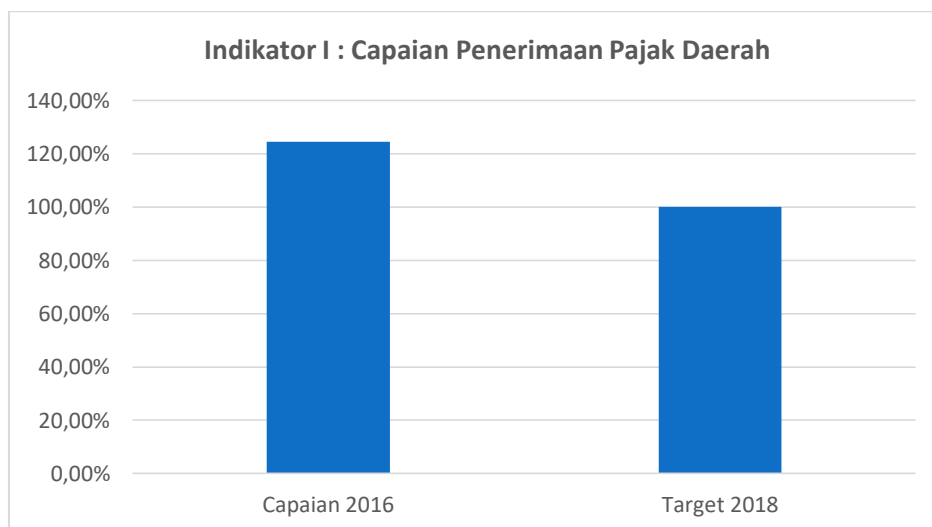


## Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

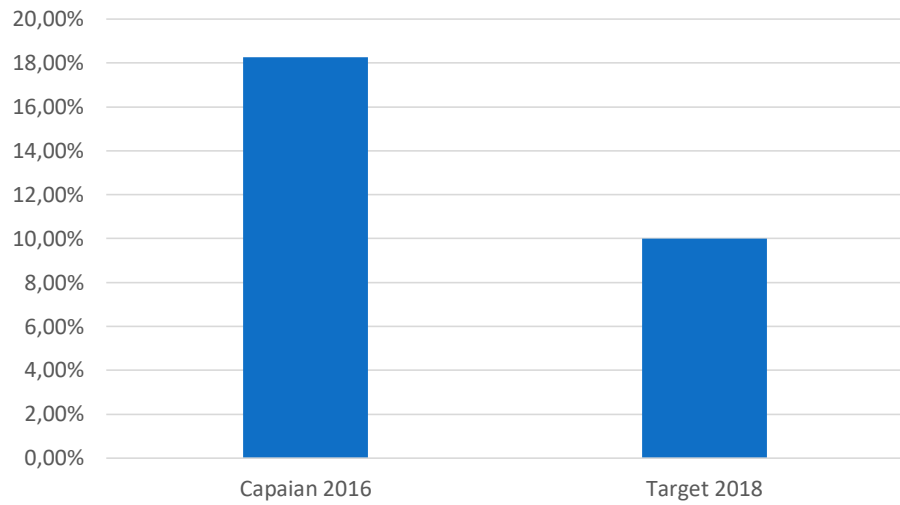
Perbandingan Capaian Kinerja pada Misi Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2018
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	124.47%	100%
	- % Peningkatan Pajak Daerah	18.25%	10%
	- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	1.85%	5%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	80.94	81.30
3. Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	10.07%	<10%

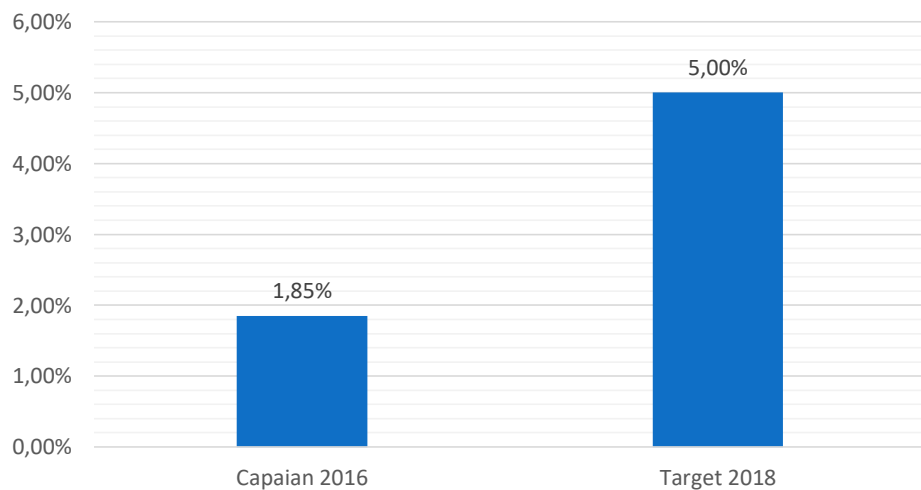
### Sasaran I : Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah



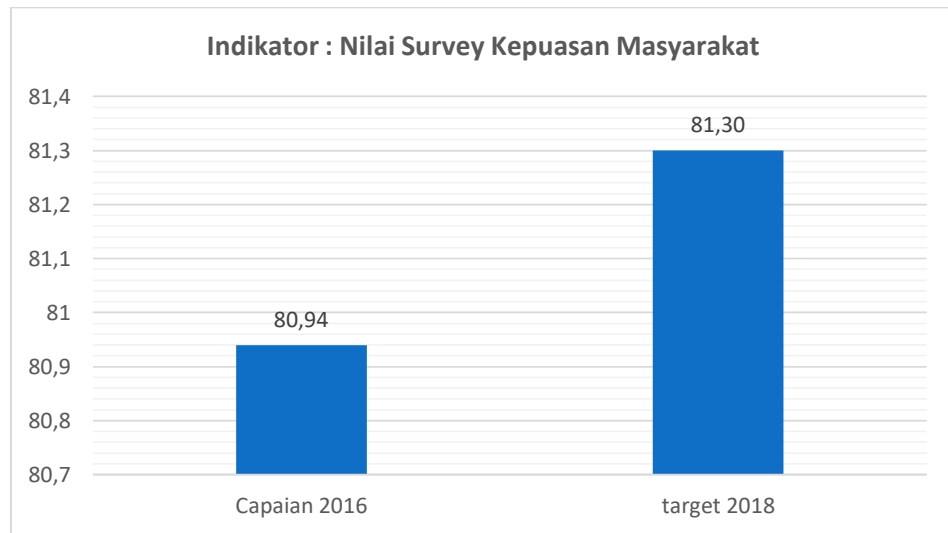
### Indikator II : % Peningkatan Pajak Daerah



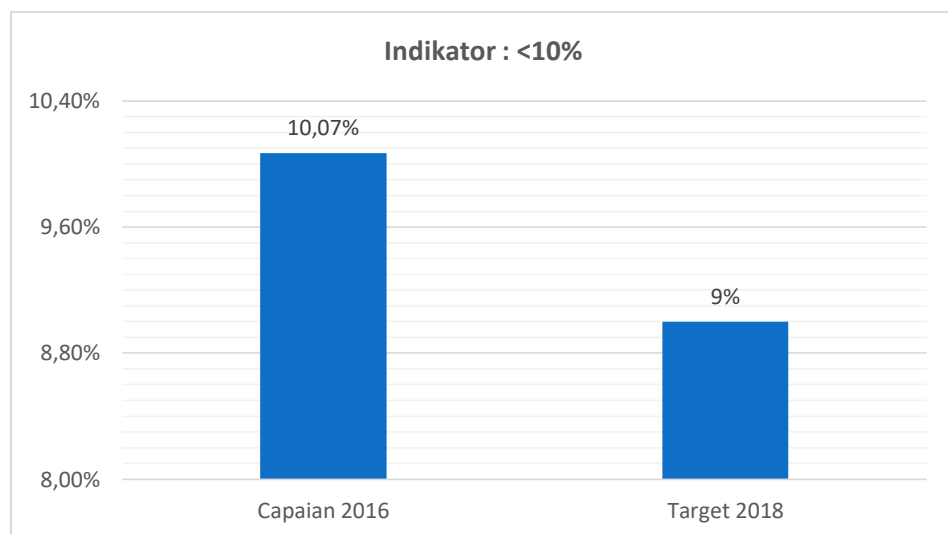
### Indikator III : % Penurunan tunggakan Pajak Daerah



## Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah



## Sasaran III : Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah



### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016 ini mencapai 124.47 %. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100% tiap tahunnya. Sedangkan bila dilihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah, kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2016 ini lebih besar yaitu 18.25 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 13.60 %.

Keberhasilan Dispenda kota Malang dalam memungut pajak tahun 2016 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, dan penagihan.

#### **4. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Tax performance index (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama Dispenda Kota Malang). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh, angka TPI untuk Tahun 2016 ini adalah 124,47 % Hal. Ini berarti pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan sudah efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil dari pengukuran tersebut didapat angka 10,7 % lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar <10%, dari hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Dispenda Kota Malang dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif namun kurang Efisien.

#### **B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN**

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota malang tahun Anggaran, pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Kota Malang adalah ditargetkan sebesar Rp.44.159.11.345,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.723.083.765,00 atau 86.32 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp.25.162.011.345,12 dengan realisasi sebesar Rp.21.719.634.922,00 atau 86 % dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.997.100.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.160.003.448.843.00 atau 85 %.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

***Perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah***

<b>NO.</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1.</b>	<b>Anggaran Tidak Lansung</b>	<b>25.162.011.345,12</b>	<b>21.719.634.922,00</b>
	Belaja Pegawai	25.162.011.345,12	21.719.634.922,00
<b>2.</b>	<b>Anggaran Belanja Lansung</b>	<b>18,997,100,000.00</b>	<b>16.003.448.843,00</b>
<b>a</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,116,800,000.00</b>	<b>4.156.414.597,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	432,310,000.00	329.187.800,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,050,000,000.00	999.414.347,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,000,000.00	34.987.400,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	133,994,850.00	130.473.800,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	154,887,000.00	153.217.125,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,000,000.00	13.750.000,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,407,608,550.00	1.990.252.075,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,999,600.00	9.999.600,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	100,000,000.00	15.550.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000.00	271.422.450,00
11	Pawai Pembangunan	50,000,000.00	49.250.000,00

NO.	RINCIAN	TARGET	REALISASI
12	Pengembangan SDM (Workshop, Pelatihan dll)	375,000,000.00	158.910.000,00
<b>b</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>4,064,800,000.00</b>	<b>3.190.772.925,00</b>
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	900,000,000.00	843.957.750,00
2	Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office	100,000,000.00	98.295.000,00
3	Penyediaan sarana/prasarana Penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan	1,000,000,000.00	801.212.175,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	800,000,000.00	396.348.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	382,300,000.00	186.765.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000.00	9.480.000,00
7	Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah	872,500,000.00	854.715.000,00
<b>c</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>434,000,000.00</b>	<b>292.928.500,00</b>
1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	155,000,000.00	114.486.000,00
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas	195,000,000.00	133.187.500,00
3	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	84,000,000.00	45.255.000,00
	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>9,301,500,000.00</b>	<b>8.288.267.821,00</b>
1	Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)	352,000,000.00	142.026.500,00
2	Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)	1,870,575,775.00	1.727.269.645,00
3	Pengolahan data dan penagihan piutang PBB	300,000,000.00	209.146.000,00
4	Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah	72,500,000.00	51.572.000,00
5	Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah	297,000,000.00	277.740.000,00
6	Gebyar Sadar Pajak	675,000,000.00	627.839.700,00
7	Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah	0.00	
8	Kajian Penetapan Target Pajak Daerah	50,000,000.00	46.519.100,00
9	Optimalisasi Penerimaan PBB	2,406,424,225.00	2.148.343.276,00
10	Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online	90,000,000.00	74.565.000,00
11	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOB) PBB	50,000,000.00	48.570.000,00
12	Pendataan dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)	400,000,000.00	355.870.000,00
13	Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak daerah	40,000,000.00	39.570.000,00
14	Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah	150,000,000.00	144.880.000,00
15	Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah	1,650,000,000.00	1.611.319.000,00
16	Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB	50,000,000.00	42.098.000,00

NO.	RINCIAN	TARGET	REALISASI
17	Kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	50,000,000.00	42.754.000,00
18	Sosialisasi pajak melalui reklame outdoor semua Bando/Baloho/Billboard se Kota Malang	198,000,000.00	197.650.000,00
19	Perencanaan rekrutmen tenaga non PNS tahun 2017	40,000,000.00	37.900.000,00
20	Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang	275,000,000.00	213.024.800,00
21	Pengelolaan Benda-Benda Berharga	75,000,000.00	68.931.800,00
22	Pembukuan dan Pelaporan	60,000,000.00	48.038.000,00
23	Kajian Administrasi Pajak Daerah	150,000,000.00	132.641.000,00
<b>d</b>	<b>Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>75.065.000,00</b>
1	Survalance Audit ISO 9001-2008	80,000,000.00	75.065.000,00

**a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

**1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan ini berupa aktifitas surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar ke Dinas/Instansi lain. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.432.310.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 329.187.800.00 atau 76 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 1 premi asuransi untuk 13 unit mobil dan 53 unit sepeda motor. Sedangkan hasil dari kegiatan ini yaitu terselesaikannya administrasi perkantoran. Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.800.300.00. kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. BOSAWA ANSURANSI Jl. Terusan Sulfat KAV. C1 No.. 28 A Lantai 2 Malang.

Permasalahan dari kegiatan tersebut adalah minimnya SDM yang menangani surat menyurat. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu diberikannya tambahan tenaga administrasi yang menguasai komputer untuk memperlancar kegiatan surat-menyurat.

**2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**

Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pemberitaan/penyiaran melalui media cetak, elektronik, maupun online. Menggunakan dana sebesar Rp.1.050.000.000.00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 9.99.414.347.00 atau 95 % karena disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 tahun.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemberitaan/penyiaran dan informasi perpajakan daerah melalui media cetak, elektronik, maupun online :

- 1 Media cetak lokal bertema umum dan informal dengan oplah Malang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal berjaring regional dengan oplah 6.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT MALANG EKSPRES CEMERLANG Ruko Sawojajar Mas Cluster Apple No. 1-9 Malang.
- 1 Media cetak lokal berjaring regional dengan oplah 8.000 eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal berjaring regional dengan oplah 8.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT. MEMONTUM TUNG SEJAHTERA Jl. MT. Haryono 1 AB No. 6 Komplek ruko Istana dinoyo Malang..
- 1 Media cetak lokal bertema umum segmentasi menengah kebawah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal umum segmentasi menengah kebawah oplah 8.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT. MEMORANDUM SEJAHTERA Ruko Istana Dinoyo Jl. M.T. Haryono 1A No. 6 Malang.
- 1 Media cetak nasional berbasis bisnis dengan oplah malang raya 3.000 eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi Rp. 50.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak nasional bertema bisnis oplah 3.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT. JURNALINDO AKSARA GRAFIKA Jl. Mas Mansyur No. 12A Jakarta Pusat.
- 3 Penyiaran media Radio Lokal. Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media radio

lokal. Dilaksanakan oleh PT. RADIO MITRA ADI SWARA Jl. Dr. Cipto No.16 Malang.

- 1 Media televisi lokal jaringan regional. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media televisi lokal jaringan regional. Dilaksanakan oleh PT. JANNAH BATU TELEVISI Ruko Tlogomas Square Kav. 31 Jl. Raya Tlogomas No. 23 Malang.
- 1 Media Televisi lokal mandiri bertema umum. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media televisi likal mandiri bertema umum. Dilaksanakan oleh PT. MALVETE Jl. Puncak Joyo Agung Malang.
- 1 Media cetak regional dengan oplah 25.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pemberitaan/pemberitaan media cetak regional di kota malang. Dilaksanakan oleh PT. ANTAR SURYA MEDIA Jl. Rungkut Industri No.68-70 SURABAYA.
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media online. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran secara on-line. Dilaksanakan oleh PT. MALANG VAICE SEJAHTERA Jl. Danau Kerinci VII Block A-1 D No 17 Malang.
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media online. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberitaan/penyiaran media online. Dilaksanakan oleh PT. DAWAI CITRA SEMESTA Jl. Raya Dieng No. 27 A Malang
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media cetak lokal berjaring nasional dengan oplah 50.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.



180.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya media cetak lokal berjangka nasional. Dilaksanakan oleh PT. MALANG INTERMEDIA PERS Jl. Arjuno 23 Malang.

- 1 Paket Pengadaan Belanja Jasa Pemberitaan/Penyiaran Media Cetak Regional Bertema Birokrasi dengan Oplah Malang Raya 5.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.600.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.600.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyiaran iklan dimedia cetak. Dilaksanakan oleh PT. HARIAN BHIRAWA Jl. Indragiri 73 Sawunggaling Wonokromo Surabaya.
- 1 Paket Pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media radio lokal. Alokasi anggaran yaitu Rp. 15.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya siaran spot himbauan, sosialisasi, terkait pajak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. RADIO SUARA MELENIUM Jl. WR. Supratman C1 No. 1 Malang.
- 1 Paket Pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media on-line yang memiliki lebih dari 5.000 viwer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/ penyiaran secara on-line. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. MALANG VOICE SEJAHTERA Jl. Danau Kerinci VIII Blok A1-D Malang.
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media online. Alokasi anggaran sebesar Rp. 215.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberitaan/penyiaran media on-line. Dilaksanakan oleh PT. DAWAI CITRA SEMESTA Jl. Raya Dieng No. 27 A Malang
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media on-line. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberitaan/penyiaran media on-line. Dilaksanakan oleh PT. DAWAI CITRA SEMESTA Jl. Raya Dieng No. 27 A Malang.



### 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, untuk alokasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp.35.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.987.400.00 atau 99% hasil dari kegiatan ini tersedianya alat-alat kebersihan, dengan hasil dari kegiatan ini kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam keadaan bersih.

### 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan administrasi surat menyurat. Alokasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp.1.33.994.850.00 dengan realisasi sebesar Rp.130.473.800.00 atau 97 %.hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Belanja alat tulis kantor ( ATK ). Alokasi anggaran sebesar Rp. 120.094.850.00 dengan realisasi sebesar Rp. 116.573.800.00. hasil dari kegiatan ini yaitu terselesaikannya administrasi perkantoran kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. RUAS BAMBU Jl. Ade Irma Suryani 14 RT. 03 RW. 06 Malang.

### 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini merupakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp.154.887.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 153.217.125.00 atau 98 %.

Keluaran dari kegiatan ini

- berupa 17 jenis barang cetakan Sekretariat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 123.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.755.000,00 Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Dilaksanakan oleh CV. KARANG PANDEGA Jl. Vilnolia 29 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- berupa Profile dispenda. Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.887.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.800.000,00 Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah tTerbentukan Buku Profil Dispenda. Dilaksanakan oleh CV. ADI SELARAS Jl. D. BRATAN V G-5- Malang.

#### **6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Kegiatan ini merupakan penyediaan alat-alat listrik yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.18.000.000.00 dengan realisasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 13.750.000.00 atau 76 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat listrik sesuai kebutuhan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat-alat listrik sesuai kebutuhan.

#### **7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan ini merupakan penyediaan keperluan peralatan dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.2.407.608.550.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.990.252.075.00 atau 82 %. Hasil dari kegiatan ini tersedianya barang dan perlengkapan kantor dispenda

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1 jenis belanja modal pengadaan alat-alat studio 1 paket. Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.800.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 187.754.200.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan studio di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. CREATIVE PRO SEMUA Jl. Perum
- 1 paket belanja modal pengadaan printer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 53.800.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.500.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan Printer di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. ARTA CITRA EMAS Jl. Banten No. 12 Malang.
- 1 paket belanja modal pengadaan printer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.200.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan Printer di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. KIBAR MAHARDIKA Jl. Batubara No. 17 Malang.

- Pengadaan Kursi kerja dan sofa. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.250.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.715.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV.JANTI MULTI JAYA TEHNIK Jl. Janti BaratNo. 11 Malang.
- 1 paket belanja modal pengadaan software. Alokasi anggaran sebesar Rp. 193.500.000.00. dengan realisasi sebesar Rp. 158.840.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya software SIM Reformasi Birokrasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh PT. GLOBAL MEDIA SOLUTION Jl. Simpang Pakisaji No. 4 Malang.
- pengadaan pakaian dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.850.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian dinas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. GUNUNG MAS Jl. Raya Kematren 01 Malang.
- Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 32.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.100.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. EL MAIN JAYA Jl. Nakula 43 Tumpang Malang.
- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.950.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. TIRTOSONO Jl. Perum Pesona Buring Raya A1/16 Malang.
- Belanja modal pengadaan televisi kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 183.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 168.325.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Sarana Prasarana televisi perkantoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh CV. CIPTA INDAH ABADI Jl. Jemursari 44 Wonocolo Surabaya.

- Belanja modal pengadaan perlengkapan dapur. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.869.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.485.500,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Sarana Prasarana perlengkapan dapur perkantoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. DWI TUNGGAL Jl. Sebuku 13 No. 16 Malang.
- Belanja modal pengadaan penhias ruangan rumah tangga. Alokasi anggaran sebesar Rp. 45.874.430,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.260.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Sarana Prasarana penhias ruangan rumah tangga di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. KIBAR MAHARDIKA Jl. Batubara No. 17 Malang.
- 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan komputer PC. Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.125.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan komputer di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. Jl. Nakula No. 43. Tumpang-Malang
- 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan komputer PC. Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 198.960.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan komputer di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. RUA BAMBU Jl. Ade Irma Suryani Timur No 4-Malang
- 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan komputer Note Book. Alokasi anggaran sebesar Rp. 137.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 134.218.125,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan komputer Note Book di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Raya Pandan Landung 90 A-Malang
- 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan komputer Note Book. Alokasi anggaran sebesar Rp. 87.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.868.250,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan

- komputer Note Book di Dinas Pendapatan Daerah kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. Griya Muslim KAV. B-6 Mulyorejo Malang.
- 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan UPS dan HDD External. Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.652.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan UPS dan HDD External di Dinas Pendapatan Daerah kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. NARIMO Taman Embong Anyar II Block H-16 Malang.
  - Belanja modal pengadaan mebel. Alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 194.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan mebel di Pendapatan Daerah kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. KIBAR MAHARDIKA Jl. Batubara 17 Malang.
  - pengadaan pakaian dinas dan atribut. Alokasi anggaran sebesar Rp. 186.075.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 182.6350.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian dinas dan atribut di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. GUNUNG MAS Jl. Raya Kematren 01 Malang. CV. EL MAIN JAYA Jl. NAKULA 43 Tumpang Kab. Malang.

#### **8) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan ini merupakan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan untuk karyawan/wati. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9,999,600.00 dan realisasi dalam kegiatan ini sebesar Rp. 9,999,600.00 atau 100 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa surat kabar/majalah. Sedangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

#### **9) Penyediaan Makanan Dan Minuman**

Kegiatan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat. Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.550.000.00 atau 15

% Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. NRIMO Jl. Taman Embong Brantas Anyar II Block H. 16 DAU Malang.

#### **10) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah**

Kegiatan ini menghadiri kunjungan rapat/koordinasi yang diadakan didalam kota, luar kota dan luar propinsi. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 271.422.450.00 atau 77 % dikarenakan adanya upaya untuk lebih selektif memilih undangan-undangan rapat koordinasi dan rapat ke luar daerah sehingga hanya menghadiri undangan sesuai kepentingan.

Keluaran dari kegiatan ini berupa pelaksanaan rapat konsultasi dalam daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

#### **11) Pawai Pembangunan**

Kegiatan ini bertujuan pelaksanaan pawai pembangunan . Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.250.000.00 atau 89 %. Hasil dari kegiatan ini Terlaksananya sosialisasi perpajakan melalui pawai pembangunan. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh CV. RUAS BAMBU Jl. Ade Irma Suryani 14 RT. 03 RW. 06 Malang.

#### **12) Pengembangan SDM ( Workshop, Pelatihan dll )**

Kegiatan ini berupa pelaksanaan peningkatan pelayanan publik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 375.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 158.910.000,00 atau 42 %.

- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.475.000,00. dengan realisasi sebesar Rp. 158.360.000,00 Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan peningkatan kapasitas ASN di Dinas Pendapatan daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. CV. ARWANA TOUR Jl. Simpang Raya Langsep 23 Malang.



**b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

**1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional**

Kegiatan ini tersedianya Mobil Pelayanan Pajak Keliling. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.9.00.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 843.957.750.00 atau 93 %.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1 Paket pengadaan alat-alat angkutan bermotor minibus. Alokasi Anggaran ini sebesar Rp. 226.000.000,00 terialisasi sebesar RP. 221.295.000,00 Hasil dari kegiatan ini Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur ( Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat luas dalam hal pelayanan pajak daerah ).kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. ISUZU SALES OPERATION Jl. Sunadar Priyosudarmo No. 40 Malang.
- 1 Paket pengadaan alat-alat angkutan mobil pick up. Alokasi Anggaran ini sebesar Rp. 164.748.406,00 terialisasi sebesar RP. 129.786.000,00,00 Hasil dari kegiatan ini Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur( Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat luas dalam hal pelayanan pajak daerah secara on-line).kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. UNITED MOTOR CENTRE ( UMC ) Cab. Malang Jl. Sunadar Priyosudarmo No. 18 Malang.
- 1 Paket pengadaan alat-alat kelengkapan penunjang mobil pelayanan pajak on-line. Alokasi Anggaran ini sebesar Rp. 474.000.100,00 terialisasi sebesar RP. 458.000.000,00 Hasil dari kegiatan ini Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur ( Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat luas dalam hal pelayanan pajak daerah secara on-line).kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. GATRA PERDANA PUTRA Jl. Letjen Sutoyo 4-6 Malang.

**2) Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office**

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya terbangunnya penambahan ornamen gapura. Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.295.000,00 atau 98 %.

- 1 Paket Belanja jasa konsultansi Supevisi Rp.3.800.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.7550.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersampainya Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gapura Zona Intergritas di lingkungan Block Office.. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. SINAN Jl. Janti Barat I-27 Malang.
- Pembangunan gapura zona integritas tahun 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp. 90.950.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 89.350.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Gapura zona intergritas di Lingkungan Block Office guna mengsinergikan kegiatan pencegahan korupsi . Dilaksanakan oleh CV.PANJI PEMENANG jl. LARWO E-31 Malang.
- 1 Paket Belanja jasa konsultansi Perencanaan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.740.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa gambar ( Detail Engennering desain DED ),Rencana anggaran biaya ( RAB ) back up volume dan spesifikasi teknis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. MAHA KARYA ABADI Jl. Perum Bumi Mondoroko Raya GQ 11/46 Malang.

### **3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara 13 jenis peralatan kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1 Jalan Mayjen Sungkono Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.382.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.186.765.000,00 atau 48 %.hasil dari kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan dan mesin. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah peralatan dan mesin kantor dalam keadaan baik

### **4) Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya teknis perencanaan pembangunan gudang arsip pajak 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp. 872.500.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 854.715.000.00 atau 97 %.

- 1 Paket Belanja jasa konsultansi Supevisi Rp.35.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.600.000,00. Hasil dari kegiatan ini yaitu

tersampainya Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gapura Zona Intergritas di lingkungan Block Office.. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. SINAN Jl. Janti Barat I-27 Malang.

- Pembangunan gudang arsip pajak daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 807.300.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 397.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya gedung gudang arsip di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV.PANJI PEMENANG jl. LARWO E-31 Malang.
- 1 Paket Belanja jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 21. 700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.115.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa gambar ( Detail Engennering desain DED ),Rencana anggaran biaya ( RAB ) back up volume dan spesifikasi teknis Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. MAHA KARYA ABADI Jl. Perum Bumi Mondoroko Raya GQ 11/46 Malang.

#### **5) Penyediaan sarana/prasarana Penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Proses pengadaan barang/jasa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 801.212.175.00 atau 80 %.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Pengadaan mabeler lainnya penunjang UPT pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 186.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 178.080.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. KARYA INTEGRAL Jl. KH. Yusuf City Inside B-15 Malang.
- Belanja modal perlengkapan kantor UPT. Alokasi anggaran sebesar Rp. 142.500.00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.250.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan

- prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. ARTA CITRA EMAS Jl. Banten 12 Malang.
- Belanja pengadaan mebeler penunjang UPT. Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.465.375,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. RUAS BAMBU Jl. Irma Suryani Timur 14 Malang.
  - Pengadaan komputer UPT pelayanan pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 177.700.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. BONANZA Perum Griya Muslim KAV. B-6 Kota Malang.
  - Pengadaan peralatan kantor UPT pelayanan pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 191.743.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 146.850.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Pandanlandung RT 013 RW. 003 Wagir Malang.
  - Belanjapengadaan ATK UPT pelayanan pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.904.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.682.750,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. RUAS BAMBU Jl. Irma Suryani Timur 14 Malang.

#### **6) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.480.000.00 atau 80 % hasil dari kegiatan ini terciptanya pemeliharaan peralatan mebeleur.

## **7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 396.348.000.00 atau 80 %. Hasil dari kegiatan ini terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas yaitu servis 16 unit mobil dinas dan 53 sepeda motor dinas.

## **c. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

### **1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran**

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan semesteran. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.155.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 114.486.000.00 atau 73 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa buku laporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi.

### **2) Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas**

Kegiatan ini berupa penyusunan perencanaan dan laporan akuntabilitas. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.195.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 133.187.500.00 atau 68 %.

- Belanja jasa konsultasi survey kepuasan masyarakat. alokasi anggaran sebesar RP. 47.437.500,00 dengan realisaasi sebesar RP. 47.137.500,00 hasil dari kegiatan ini tersedianya hasil survey persepsi korupsi sebagai bahan acuan dasar dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di Dinas Penadapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. GLOBAL SOLUTION Jl. Simpang Pakisaji No 04 RT. 10 RW. 02 Kab. Malang.
- Belanja jasa konsultasi survey persepsi korupsi. alokasi anggaran sebesar RP. 50.000.000,00 dengan realisaasi sebesar RP. 49.000.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terukurnya kepuasan mayarakat dalam pelayanan pajak daerah dan terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing masing unit

pelayanan pajak daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.DC. GLOBALINDO Jl. Simpang Pakisaji No. 08 Malang.

**3) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Kegiatan ini yaitu 1 paket jasa konsultasi perencanaan dengan Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.255.000.00 atau 53 %. Hasil dari kegiatan ini yaitu untuk terlaksananya Pelaksanaan Zona Integritas menuju

**d. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**1) Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 352.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.142.026.500,00 atau 40 %. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya dokumentasi iklan layanan masyarakat pajak daerah non PBB.

**2) Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (non PBB)**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sektor pajak daerah lainnya dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.1.870.575.775.00 dengan realisasi sebesar Rp.1.727.269.645.00 atau 67 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Pengadaan Barang cetakan. Alokasi anggaran sebesar Rp. . 260.279.400.00 dengan realisasi sebesar Rp. 153.088.045.00. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dilaksanakan oleh CV. PRIMA MITRA Jl. Jagir Sidomukti VI/34 Malang.
- Belanja modal pengadaan alat alat teknis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. . 157.376.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.500.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah menyediakan barang



modal mobile filling arsip pajak daerah non PBB di bidang pajak lainnya. Dilaksanakan oleh CV. SMART SOLUSI INDONESIA Jl. Tropodo Indah K-4 Sidosarjo.

- Belanja jasa konsultasi alih media . Alokasi anggaran sebesar Rp. . 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.885.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah memiliki kearsipan secara elektronik yang tertata rapi sesuai kaidah kearsipan agar dapat di manfaatkan secara optimal untuk menunjang kinerja dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. SMART SOLUSI INDONESIA Jl. Tropodo Indah K-4 Sidosarjo.
- Pengadaan software BPHTB . Alokasi anggaran sebesar Rp. . 157.650.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 115.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya software untuk mempermudah operasional dan manajemen pajak daerah khususnya pajak BPHTB dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh PT. CENDANA TEKNIKA UTAMA Ruko Permata Shanta NR. 24-25 Kota Malang.
- Pengadaan jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. . 40.089.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pajak daerah di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. INDAH KARYA Jl. Raya Tlogomas III No. 26 Malang
- Belanja alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. . 108.571.100.00 dengan realisasi sebesar Rp. 101.566.100.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana prasarana di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. PUTRI HARAPAN Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 134 Malang.
- Belanja pakaian olah raga . Alokasi anggaran sebesar Rp. . 72.520.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.780.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhnya sarana prasarana pakaian olah raga di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. TIRTOYONO Perum Pesona Buring Raya A1/16 Malang.
- Pengadaan jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. . 30.831.500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.831.500.00. Hasil dari

kegiatan ini adalah peningkatan pajak daerah di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh PT. ERA GUNA KARYA Dsn. Prambatan RT. 04 RW. 01 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu

### **3) Pengolahan data dan penagihan piutang PBB**

Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan data dan penagihan piutang PBB dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.209.146.000.00 atau 69 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- belanja bahan/material patok. Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.850.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunya dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. KIBAR MAHARDIKA Jl. Batu Bara No. 17 Malang.
- Belanja cetak dan pengadaan berupa stiker segel peringatan PBB. Alokasi anggaran sebesar Rp. 17.850.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.850.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbangunya dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. OSA Jl. Teluk Pelabuhan Ratu II No. 15 Malang
- Belanja cetak dan pengadaan berupa stiker segel peringatan PBB. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.740.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.167.500.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbangunya dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. OSA Jl. Teluk Pelabuhan Ratu II No. 15 Malang.

### **4) Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah**

Kegiatan ini merupakan kegiatan verifikasi tunggakan dan penyelesaian keberatan pajak dengan alokasi anggaran sebesar RP. 72.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar RP. 51.572.000,00 71 % Hasil dari kegiatan ini adalah menyelesaikan atau meverifikasi tunggakan dan penyelesaian pajak, analisa dan usulan penghapusan piutang pajak.

#### 5) Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.570.000,00 atau 97 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Belanja alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.291.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.291.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DC. GLOBALINDO Jl. Smpang Pakisaji No 4 Kab. Malang.
- Belanja cetak dan pengadaan berupa stiker segel peringatan PBB. Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.288.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.288.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DC. GLOBALINDO Jl. Smpang Pakisaji No 4 Kab. Malang.
- Belanja sewa ruang rapat / pertemuan . Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 57.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah akan peraturan daerah dan perubahannya Malang. Dilaksanakan oleh MITRA ANUGRAH JAYA Jl. Letjen Sutoyo 32 Rampal Celaket Malang.
- Belanja sewa ruang rapat / pertemuan . Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah akan peraturan daerah dan perubahannya Malang. Dilaksanakan oleh MITRA ANUGRAH JAYA Jl. Letjen Sutoyo 32 Rampal Celaket Malang.

#### 6) Gebyar Sadar Pajak

Kegiatan ini bertujuan untuk Sosialisasi Pajak Daerah dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.675.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.627.839.700.00 atau 93 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Belanja cetak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.413.900.00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.413.900.00. Hasil dari kegiatan ini adalah

Peningkatan Pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. ADI SELARAS Danau Bratan V G5 H Malang.

- Belanja Pengadaa hadiah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. ADI SELARAS Danau Bratan V G5 H Malang.
- Belanja jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.449.200.00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.995.800.00. Hasil dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. ADI SELARAS Danau Bratan V G5 H Malang.
- Balanja pengadaan hadiah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 162.452.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pajak daerah. Dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL CABANG MALANG JL. Ahmad Yani 175 Malang.
- Belanja jassa penyelenggaraan event ( penyelenggaraan hiburan ). Alokasi anggaran sebesar Rp. 190.075.100.00 dengan realisasi sebesar Rp. 185.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayjen Panjaitan 2 C Malang.

#### **7) Kajian Penetapan Target Pajak Daerah**

Kegiatan ini berupa pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.519.000.00 atau 93 %. Keluaran dari kegiatan ini 15 dokumen Penunjang penetapan target daerah.

- Belanja pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 44.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.549.000,00 Hasil dari kegiatan ini berupa buku laporan yang menganalisa variable-variable yang berpengaruh serta implikasinya terhadap penerimaan pajak daerah.kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.CITIPLAN Jl. Raya Tlogomas III/26 Kota Malang.

## 8) Optimalisasi Penerimaan PBB

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.2.406.424.225,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.148.343.276,00 atau 89 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Belanjapengadaan ATK. Alokasi anggaran sebesar Rp. 161.796.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 159.274.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. ESAS SEGITIKMA Jl. Baturetno No. 62 Singosari - Malang.
- Belanja Pengadaan dan cetakan anggaran sebesar Rp. 194.850.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.23.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana di dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Raya Pandan Landung Wagir. Kab. Malang
- pengadaan pakaian Kerja lapangan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.400.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian Kerja Lapangan ( Jaket ) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. WAKITA BANGUAN PERSADA Jl. Perum Griya Sahanta I 303 Malang.
- Belaja jasa penyelenggaraan event tax go to schooll. Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.350.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyelenggaraan event go to school di kota malang. Dilaksanakan oleh CV. A.A. Jl. Mayjend Panjaitan No. 2C-Malang.
- Belaja jasa penyelenggaraan event blusukan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.080.000.00. Hasil dari kegiatan ini tercapainya penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan event the blisikan. Dilaksanakan oleh CV. GEMAR JAYA CORPORATION Perim Gadang Regency Block Q No. 19 Malang.
- Belaja jasa penyelenggaraan event launching SPPT PBB 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.

48.930.000.00. Hasil dari kegiatan ini tercapainya penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan event launching SPPT PBB 2016 dan Gebyar Panutan Pembayaran PBB. Dilaksanakan oleh CV. GEMAR JAYA CORPORATION Perim Gadang Regency Block Q No. 19 Malang.

- Belanja jasa konsultasi alih media arsip PBB . Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.880.000.00. Hasil dari kegiatan ini Menyediakan jasas konsultasi alih media arsip. PBB di bidang pajak dan bangunan dinas pendapatan daerah kota malang. Dilaksanakan oleh CV. SMART SOLUSI INDONESIA Jl. Tropodo Indah K-RT 33 RW. 004 Dsn. Tropodo Waru Sidoarjo.

#### **9) Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasikan dan Online**

Kegiatan ini berupa pendampingan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasikan dan on-line. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.90.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 74.565.000.00 atau 82 %. Hasil dari kegiatan ini terdapatnya 2 pendampingan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasikan dan on-line.

#### **10) Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.570.000,00 atau 97 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Belanja jasa konsultasi pendampingan aplikasi SISMIOP. Alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.620.000.00. Hasil dari kegiatan ini terdapatnya kegiatan pendampingan sistem informasi manajemen objek pajak ( SISMIOP ) tahun anggaran 2016 sampai selesai.

#### **11) Pendataan dan Penyusunan Database Tunggal PBB (cleansing data)**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.355.870.000.00 atau 99 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :



- belanja jasa konsultasi Penelitian. Alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 346.830.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunya database tunggakan PBB. Dilaksanakan oleh KOPKAR INTI" KESEJAHTERAAN" Jl. Surabaya No 3 A Malang.

## **12) Perencanaan rekrutmen tenaga non PNS tahun 2017**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.900.000,00 atau 94 %.

- Belanja jasa konsultasi perekrutan tenaga non PNS/outsorching dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.38.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.900.000.00 atau hasil dari kegiatan ini tersedianya 69 tenaga non PNS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. GLOBAL MEDIA SOLUTION Jl. Simpang Pakisaji RT. 01 RW. 02 Kab. Malang.

## **13) Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 144.880.000,00 atau 96 %.

- Kajian sensus pajak bumi dan bangunan ( PBB ) perkatoran di wilayah kecamatan blimbing dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.48.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.47.500.000.00 atau hasil dari kegiatan ini Terciptanya rumusan dalam rangka peningkatan penmerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (PB B) di 5 kecamatan dan terindifikasinya potensi pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan ( PBB ) perkotaan kota malang sesuai dengan dengan data hasil sensus pajak ( PBB ) 5 Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. LINIAR MANAGEMANT SONSULTINDO Jl. Akardion Selatan Kav. V No 11 Tungguwulung Malang.
- Kajian sensus pajak bumi dan bangunan ( PBB ) perkatoran di wilayah kecamatan kedungkandang dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.48.500.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp.47.500.000.00 atau hasil dari kegiatan ini Terciptanya rumusan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (PB B) di 5 kecamatan dan terindifikasinya potensi pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan ( PBB) perkotaan kota malang sesuai dengan dengan data hasil sensus pajak ( PBB ) 5 Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. CIPTA GLOBAL INDONESIA Dsn Klampok No. 2 TR. 31 Rw. 02 Kucur – DAU Kab. Malang.

#### **14) Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.1.650.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.611.319.000,00 atau 97 %.

- Pengadaan jasa konsultasi sensus potensi wajib pajak daerah wilayah kecamatan kedungkandang dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp536.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.531.025.000.00 atau hasil dari kegiatan ini Terciptanya data obyek pajak yang telah diinventarisasi, data perubahan obyek oajak secara fungsi status kepemilikan dan peruntukan tanah atau bangunan dan data potensi pajak bumi dan bangunan di kota malang yang belum terdaftar pada dinas pendapatan daerah kota malang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV.CITIPLAN jl. Raya Tlogomas III Lowokwaru Malang.

Potensi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, secara keseluruhan setelah sensus dilakukan maka potensi nilai pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp27.822.681.307,22 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) pertahun. Potensi nilai pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.822.681.307,22 ini diperoleh dari 5 (lima) kelurahan dengan rincian:

- (1) Kelurahan Kedungkandang sebesar Rp5.969.253.182,71
- (2) Kelurahan Arjowinangun sebesar Rp4.795.663.429,79
- (3) Kelurahan Sawojajar sebesar Rp8.839.751.342,80
- (4) Kelurahan Bumiayu sebesar Rp3.743.317.364,36 dan

(5) Kelurahan Buring sebesar Rp4.474.695.987,56

Sehingga prediksi potensi nilai pajak bumi dan bangunan pada sensus tahun 2016 ini cukup signifikan bagi pemasukan PAD di Kota Malang.

- Pengadaan jasa konsultasi sensus potensi wajib pajak daerah wilayah kecamatan blimbing dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp536.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.531.614.000.00 atau hasil dari kegiatan ini terciptanya data obyek pajak yang telah diinventarisasi, data perubahan obyek oajak secara fungsi status kepemilikan dan peruntukan tanah atau bangunan dan data potensi pajak bumi dan bangunan di kota mlang yang belum terdaftar pada dinas pendapatan daerah kota malang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV.CITIPLAN jl. Raya Tlogomas III Lowokwaru Malang.

Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, secara keseluruhan setelah sensus dilakukan maka nilai potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 16.468.184.731,23 ( Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Dua Puluh Tiga Rupiah). Jumlahnya meningkat sebesar Rp. 1.844.111.815,23,- dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 14.624.072.916 ( Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah). Berikut rincian dari masing-masing kelurahan:

- (1) Kelurahan Pandanwangi sebesar Rp. 3.644.796.779,19,-
- (2) Kelurahan Arjosari sebesar Rp. 1.725.180.891,-
- (3) Kelurahan Blimbing sebesar Rp. 1.853.184.126,20,-
- (4) Kelurahan Balearjosari sebesar Rp. 3.772.767.020,15,-
- (5) Kelurahan Purwantoro sebesar Rp. 5.472.255.914,35,-.

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada sensus tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

- Pengadaan jasa konsultasi sensus potensi wajib pajak daerah wilayah kecamatan sukun dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp536.525.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp.534.325.000,00 atau hasil dari kegiatan ini Terciptanya data obyek pajak yang telah diinventarisasi, data perubahan obyek oajak secara fungsi status kepemilikan dan peruntukan tanah atau bangunan dan data potensi pajak bumi dan bangunan di kota mlang yang belum terdaftar pada dinas pendapatan daerah kota malang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV.CITIPLAN jl. Raya Tlogomas III Lowokwaru Malang.

Hasil Kajian Sensus Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Malang Wilayah Kecamatan Sukun, Maka Potensi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, secara keseluruhan setelah sensus dilakukan maka potensi nilai pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp 26.073.044.618,75- pertahun. Potensi nilai pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 26.073.044.618,75- ini diperoleh dari 5 (lima) kelurahan dengan rincian:

- (1) Kelurahan Bandulan sebesar Rp3.960.101.832,92
- (2) Kelurahan Bandungrejosari sebesar Rp6.241.577.708,86
- (3) Kelurahan Kebonsari sebesar Rp5.069.489.263,72
- (4) Kelurahan Sukun sebesar Rp6.541.148.808,90 dan
- (5) Kelurahan Mulyorejo sebesar Rp4.260.727.004,35.

Sehingga prediksi potensi nilai pajak bumi dan bangunan pada sensus tahun 2016 ini cukup signifikan bagi pemasukan PAD di Kota Malang.

- Pengadaan jasa konsultasi sensus potensi wajib pajak daerah wilayah kecamatan Lowokwaru dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp536.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.531.614.000.00 atau hasil dari kegiatan ini Terciptanya data obyek pajak yang telah diinventarisasi, data perubahan obyek oajak secara fungsi status kepemilikan dan peruntukan tanah atau bangunan dan data potensi pajak bumi dan bangunan di kota mlang yang belum terdaftar pada dinas pendapatan daerah kota malang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV.CITIPLAN jl. Raya Tlogomas III LowokwaruMalang.
- Belanjapengadaan ATK. Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.025.000,00 hasil dari kegiatan ini adalah

terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT pelayanan pajak di 5 kecamatan. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. DC. GLOBALINDO Jl. No. 08 Desa Pakisaji Kab. Malang.

#### 15) Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB

Kegiatan ini berupa pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.098.000.00 atau 84 %. Keluaran dari kegiatan ini 1 dokumen kajian

- Belanja pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 44.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.275.000,00 Hasil dari kegiatan ini berupa buku laporan yang dirumuskan Strategi kebijakan peningkatan pendapatan pajak daerah non PBB di kota malang.kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.SINERGI PERSADA UTAMA Perum River Side D-6 Blimbing Kota Malang. dengan hasil Kajian sebagai berikut :

1. Selama periode 2010-2015, realisasi penerimaan pajak daerah seluruhnya telah melebihi target. Dilihat dari *collection ratio*-nya, mencapai angka di atas 105%. Pada tahun 2012, *collection ratio* penerimaan pajak daerah menjadi yang tertinggi yaitu 126,08%.
2. Berdasarkan perhitungan Laju pertumbuhan pajak daerah (*include* PBB) pada tahun 2011 berada pada kriteria **sangat berhasil**. Pada tahun 2012 berada pada kriteria **tidak berhasil** karena laju pertumbuhan di bawah 30%. Pada tahun 2013 tersebut masuk dalam kategori **kurang berhasil**, karena laju pertumbuhannya di antara 30% - 55%. Sementara itu, Angka pertumbuhan pada tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk dalam kategori **tidak berhasil**, karena laju pertumbuhannya di bawah 30%. Secara rata-rata selama periode 2010-2015, laju pertumbuhan pajak daerah Pemerintah Kota Malang berada pada kriteria yang **kurang berhasil**, karena laju pertumbuhannya di antara 30% - 55%.
3. Berdasarkan perhitungan Laju pertumbuhan pajak daerah (*exclude* PBB) pada tahun 2011 berada pada kriteria **sangat berhasil**. Pada tahun 2012 berada pada kriteria **tidak berhasil** karena laju



pertumbuhan di bawah 30%. Pada tahun 2013 tersebut masuk dalam kategori **tidak berhasil**, karena laju pertumbuhannya di bawah 30%. Adapun, Angka pertumbuhan pada tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk dalam kategori **tidak berhasil**, karena laju pertumbuhannya di bawah 30%. Secara rata-rata selama periode 2010-2015, laju pertumbuhan pajak daerah Pemerintah Kota Malang berada pada kriteria yang **kurang berhasil**, karena laju pertumbuhannya di antara 30% - 55%.

4. Berdasarkan kontribusi rata-rata per jenis objek pajak daerah non PBB selama jangka waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut: a) Pajak Hotel memiliki rasio kontribusi **sangat kurang**; b) Pajak Restoran memiliki rasio kontribusi **kurang**; c) Pajak Hiburan memiliki rasio kontribusi **sangat kurang**; d) Pajak Reklame memiliki rasio kontribusi **sangat kurang**; e) Pajak Penerangan Jalan memiliki rasio kontribusi **cukup**; f) Pajak Parkir memiliki rasio kontribusi **sangat kurang**; g) Pajak Air Tanah memiliki rasio kontribusi **sangat kurang**; h) Pajak BPHTB memiliki rasio kontribusi **sedang**;

#### **16) Kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Kegiatan ini berupa pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.754.000.00 atau 85 %. Keluaran dari kegiatan ini 1 dokumen kajian

5. Belanja pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 44.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.450.000,00 Hasil dari kegiatan ini mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkatan pencapaian PAD kota Malang.kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.ANTARA GROWTH Jl. Perum Bukit Cemara Tidar Block I 1 No. 09 Sukun Malang.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Pemerintah Kota Malang secara legalitas hukum sudah mempersiapkan secara komprehensif terkait peraturan perundang-undangan dalam rangka melakukan pemungutan pajak daerah. Hal ini menjadi kekuatan secara yuridis dalam melakukan pungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya kemampuan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap PAD berarti semakin baik pelaksanaan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah;
3. Dari sisi pertumbuhannya, dalam periode 2010-2015, secara agregat pendapatan daerah Kota Malang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,28 persen. Rata-rata Capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama 6 Tahun mencapai sebesar 31,39 persen. Dari keseluruhan komponen PAD, Pajak Daerah merupakan komponen yang pertumbuhannya berkontribusi paling besar, dengan rata-rata 43,16 persen dalam enam tahun terakhir.
4. Selama kurun 6 tahun terakhir realisasi pendapatan daerah memang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun bila dilihat dari *collection ratio* mulai tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2015 penerimaan pendapatan Kota Malang tidak mencapai target.
5. Berdasarkan data, pada rentang tahun 2010 hingga tahun 2015 realisasi PAD Kota Malang melebihi dari yang ditargetkan. Tahun 2012, secara *collection ratio*, merupakan capaian tertinggi mencapai 114,52% dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
6. Selama periode 2010-2015, realisasi penerimaan pajak daerah seluruhnya telah melebihi target. Dilihat dari *collection ratio*-nya,

- mencapai angka di atas 105%. Pada tahun 2012, collection ratio penerimaan pajak daerah menjadi yang tertinggi yaitu 126,08%.
7. Dilihat dari rasio efektivitas penerimaan PAD dan Pajak Daerah sudah memiliki rasio efektif, karena hampir selama 6 (enam) tahun terakhir rasio-nya di atas 100% kecuali pada tahun 2015 untuk PAD yang rasionya di bawah 100% yakni 97,45%.
  8. Adanya peningkatan realisasi PAD selama tahun 2010-2015 tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Malang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
  9. Upaya **intensifikasi** dilakukan dengan cara: a) fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional; b) Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah; c) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional; d) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian; e) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD; f) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
  10. Upaya **ekstensifikasi** dilakukan dengan cara: a) Melakukan pengembangan atau menggali jenis-jenis pungutan yang baru dengan mengadakan pertukaran informasi dengan Dispenda Kab/Kota se-indonesia; b) Mengadakan peninjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat; c) Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), d) Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

11. Faktor-faktor pendukung terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah: (a) Sistem jemput bola dalam arti petugas melakukan penagihan terhadap penunggak pembayaran pajak; (b) Memberikan surat peringatan terhadap para penunggak wajib pajak; (c) Memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran pajak melalui UPTD terdekat; (d) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
12. Faktor-faktor penghambat terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah: (a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran; (b) Belum mampu menetapkan sanksi; (c) kurangnya pengendalian pada sistem e-tax sehingga terjadi proses negosiasi.

**17) Sosialisasi pajak melalui reklame outdoor semua Bando/Baloho/Billboard se Kota Malang.**

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan barang cetakan dan pemasangan outdoor dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.198.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.197.650.000.00 atau 99 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

6. belanja sewa outdoor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 166.500.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.300.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kota malang yang berdampak langsung pada peningkatan perolehan pendapatan dari sector pajak. Dilaksanakan oleh CV. CIPTA GLOBAL INDONESIA Dusun Klampok No. 2 Dau Kabupaten Malang.
7. belanja ctak dan pemasangan media outdoor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.200.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.200.000.00 Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kota malang yang berdampak langsung pada peningkatan perolehan pendapatan dari sector pajak. Dilaksanakan oleh CV. CIPTA GLOBAL INDONESIA Dusun Klampok No. 2 Dau Kabupaten Malang.

### **18) Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak daerah**

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.570.000,00 atau 98 %.

8. Belanja jasa konsultasi perencanaan, perekrutan PPPK/outsourcing perekrutan tenaga non PNS / outsourcing dengan Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.38.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.820.000.00 atau 94 %. Keluaran dari kegiatan tersedianya 1 dokumen kajian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. DC. GLOBALINDO JL. Simpang Pakishaji No 8 Malang.

### **19) Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang**

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.275.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.213.024.800.00 atau 82.90%. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mengukur tingkat kejujuran wajib dalam pengisian SPTPD, serta menjangkau wajib pajak yang bandel.

### **20) Pengelolaan Benda-Benda Berharga**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.75.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.38.931.800.00 atau 68 %.

Belanja barang/jasa. Alokasi anggaran sebesar RP. 28.459.500,00 dengan realisasi sebesar RP. 27.983.300,00 hasil dari kegiatan ini adalah pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan pengendalian benda-benda berharga. Sedangkan hasilnya adalah terwujudnya pengendalian benda-benda berharga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.ERA GUNA KARYA Dsn. Prambatan RT 04 RW. 01 Ds. Bumiaja Kota Batu.

### **21) Pembukuan dan Pelaporan**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.48.038.000,00 atau 80 %.

Belanja alat tulis kantor ( ATK ). Alokasi anggaran sebesar RP. 6.389.000,00 dengan realisasi sebesar RP. 6.389.000,00 hasil dari kegiatan ini

ini adalah terwujudnya laporan realisasi pajak daerah Kota Malang. kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.DC. GLOBALINDO Jl. Simpang pakisaji 08 RT. 010 RW. Desa Pakisaji Kab. Malang.

## **22) Kajian Administrasi Pajak Daerah**

Kegiatan ini berupa pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.038.000.00 atau 88 %. Keluaran dari kegiatan ini kajian peraturan walikota tentang peraturan pajak daerah kota malang

9. Belanja pengadaan sewa ruang rapat/pertemuan jasa konsultasi perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.000.000,00 Hasil dari kegiatan ini berupa pembahasan rancangan peraturan walikota malang.kegiatan ini dilaksanakan oleh CV.SINERGI PERSADA UTAMA Perum River Side D-6 Blimbing Kota Malang.


### **e. PROGRAM PELAKSANAAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN STANDAR MANAJEMEN MUTU**

#### **1) Survalance Audit ISO 9001-2008**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.065.000,00 atau 93.%.

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 yaitu Jasa Konsultan Pemeliharaan 1 paket senilai Rp.40.000.000,00 dan Jasa konsultan Audit Eksternal senilai Rp.36.150.000,00. Dilaksanakan oleh CV. ORBIT NUSANTARA (konsultan bisnis dan management yang beralamat di jl. Letj. Hariyono no.54 gondanglegi Malang) Telp. 0341-5488809. Jasa Konsultan Pemeliharaan 1 paket senilai Rp. 50.400.000.00 dilaksanakan oleh CV. GLOBAL MEDIA SOLUTION Jl. Simp. Pakisaji No.4 Kab. Malang.

10. Belanja jasa konsultasi pemeliharaan. Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.40,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.490.000.00 dan



11. Jasa konsultasi audit external. Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar 36.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 35.575.000,00.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu Terauditnya penerapan ISO 9001-2008 oleh Auditor Eksternal dan konsultasi pemeliharaan ISO 9001-2008.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kota merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan tranparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2016 termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah direncanakan.

Malang, 7 Pebruari 2017

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG**

**Ir. H. ADE HERAWANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681017 199203 1 006